

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada seputaran tahun tahun 1700-an, kata demokrasi telah dikenal sekian lama oleh para kalangan teorisi politik dan secara umum dipahami oleh para pendidik sebagai salah satu dari tiga sistem politik Aristoteles (selain sistem aristokrasi dan monarki). Istilah ini muncul dalam abstraksi dan diskusi mengenai sistem politik yang ideal.¹

Pada perjalanannya, gelombang demokratisasi tidak berjalan mulus dan mengalami pasang surut. Pasca Perang Dunia II, tantangan gelombang anti demokrasi muncul dari negara-negara Blok Timur yang dikomandoi Uni Soviet bersama dengan negara-negara satelitnya.

Namun, gelombang demokrasi dan demokratisasi telah berubah menjadi “virus” yang cepat menyebar, terutama pada dekade 80-90an. Demokratisasi tersebut melanda berbagai belahan dunia, terutama sekali menerpa tatanan masyarakat negara-negara berkembang dan negara yang otoriter. Uni Soviet sebagai negara kampiun komunis pun tidak terlepas dari pengaruh tersebut dan mengakibatkan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Setelah lepas dari Uni Soviet, negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut berupaya menerapkan konsep demokrasi dalam sistem politik mereka. Walaupun dalam kenyataannya negara-negara tersebut malah terjebak dalam pemerintahan

¹ John Markoff *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*

yang otoriter, seperti halnya yang terjadi di Kirgizstan, Ukraina, Georgia, dan Uzbekistan. Namun lambat laun rakyat bersama kaum oposisi berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang otoriter tersebut. Revolusi yang terjadi di Ukraina, Georgia, dan Kirgizstan telah berhasil menggulingkan rezim otoriter dan menggantinya dengan pemerintahan yang lebih demokratis.

AS merupakan salah satu aktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya revolusi di Kirgizstan sehingga tergulingnya Presiden Askar Akayev. Keterlibatan AS dalam kisruh di Kirgiztan tersebut tampak begitu jelas. Hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan keterlibatan AS dalam menggulingkan Presiden Askar Akayev. Dalam hal ini penulis menilai bahwa keterlibatan AS dalam hal ini dikarenakan adanya undang-undang yang mendukung liberalisasi, yang menjadi pijakan utama politik luar negeri Amerika terhadap Rusia untuk mengukuhkan pengaruhnya di kawasan Balkan, Baltik dan Asia Tengah.

Tulisan yang mengangkat judul **“Kepentingan AS Terhadap Revolusi Tulip di Kirgizstan”** ini merupakan sumbangan penulis untuk menambah wawasan kita mengenai demokrasi terutama yang terjadi di negara-negara pecahan Uni Soviet. Disamping itu, hal ini juga dikarenakan sepanjang pengetahuan penulis bahwa belum ada penulis lain yang mengangkat permasalahan tersebut sebagai tugas akhir dalam menempuh gelar Sarjana Ilmu

B. Latar Belakang Masalah

Uni Soviet merupakan sebuah negara *super power* yang pernah berjaya selama puluhan tahun. Terbentuknya Uni Soviet tidak terlepas dari Revolusi Bolshevik yang terjadi tahun 1917, revolusi ini berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II dan menjadi awal berdirinya rezim sosialis Uni Soviet.

Uni Soviet terkenal dengan sistem pemerintahannya yang totaliter sejak masa kepemimpinan Vladimir Ilych Lenin sebagai presiden pertama Uni Soviet. Mekanisme sistem politik tersebut berlangsung di Uni Soviet dari sejak awal kekuasaan sampai kemudian ketika Uni Soviet jatuh ke tangan Mikhail Gorbachev, yang diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dan kemudian menjadi Presiden Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1985. Gorbachev ingin mengadakan perubahan di segala bidang atau reformasi yang lebih radikal daripada reformasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Uni Soviet sebelumnya.

Gagasan pembaharuan yang diusung oleh Mikhail Gorbachev tersebut meliputi tiga hal pokok, yakni:

1. *Perestroika* (restrukturisasi), dimaksudkan untuk segala bidang terutama ekonomi.
2. *Glasnot* (keterbukaan), suatu kondisi yang memungkinkan terjadi dialog dan pengungkapan kritik.
3. *Demokratizatsia* (demokratisasi) untuk membuka hak monopoli atas

Kebijakan Gorbachev yang mengakibatkan pertentangan dalam tubuh PKUS telah mengakibatkan situasi politik dan ekonomi Uni Soviet semakin memburuk. Pada tahun 1990 Uni Soviet berada dalam situasi yang sangat genting, timbul kerusuhan, defisit anggaran dalam jumlah yang sangat besar, jumlah pengangguran meningkat, pemogokan para pekerja, pendapatan menurun dan situasi konsumen menjadi lebih buruk daripada tahun 1985.²

Keadaan di atas semakin mengiringi berakhirnya masa kejayaan Uni Soviet. Setelah lepas dari Uni Soviet dan mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Rusia bersama Belarusia dan Ukraina mendirikan CIS (*Commonwealth of Independent States*) pada tanggal 8 Desember 1991. Dua minggu setelah pendirian CIS, 8 negara pecahan Uni Soviet lainnya kemudian ikut bergabung menjadi anggota. Negara-negara tersebut yakni Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgiztan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Georgia bergabung pada tahun 1993 sedangkan Lithuania, Latvia dan Estonia bergabung dalam CIS. CIS merupakan organisasi persemakmuran negara-negara pecahan Uni Soviet. Kekuasaan pusat dalam CIS menggunakan model seperti yang dipakai oleh Uni Eropa yang memiliki kekuasaan terbatas.

Namun, berada di bawah rezim otoriter Uni Soviet selama kurang lebih 70 tahun, telah mengakibatkan budaya otoriterisme tersebut menjadi warisan yang diadopsi oleh hampir seluruh penguasa di negara-negara pecahan Uni Soviet. Hal ini tentu saja menghambat proses demokrasi di negara-negara tersebut.

² Catherine J. Dulke, *Russian Politics and Society: An Introductory Reader*, Ed. 1991, p. 111.

Kirgiztan adalah salah satu negara di Asia Tengah yang merupakan negara eks Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, Kirgizstan menyatakan kemerdekaannya dan bergabung dengan beberapa eks Republik Soviet lainnya membentuk CIS. Kirgiztan yang pada mulanya dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan negara-negara eks Uni Soviet lainnya, belakangan pun menjadi negara yang dipimpin oleh pemimpin yang otoriter.

Pada tahun 1990 Askar Akayev menjadi Presiden Republik Sosialis Soviet Kirgiztan, dan setelah merdeka Askar Akayev kemudian menjadi presiden pertama Kirgiztan. Pada tahun 1996 Askar Akayev terpilih untuk kedua kalinya dan pada tahun 2002 Akayev terpilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai presiden, karena pada periode pertama dianggap masih berada di bawah konstitusi Uni Soviet.³

Sejak merdeka 31 Agustus 1991, kekuasaan berada di satu tangan, yakni Askar Akayev. Pada setiap pemilu presiden, tokoh pro-Moskow ini selalu terpilih. Tahun 1995, Akayev mendapat 70% suara, sehingga ia tetap duduk di kursi presiden. Kekuasaannya sebagai presiden memang sangat kokoh, setelah hasil referendum 1996 memberikan kepercayaan kepada lembaga kepresidenan lebih besar daripada kewenangan parlemen, sehingga pada pemilu presiden di bulan Juli 1998, ia terpilih kembali. Pada bulan Juni 2003, Majelis Rendah Parlemen menyetujui undang-undang yang memberi kekebalan hukum kepada Presiden Askar Akayev dan dua mantan pejabat tinggi Ukraina, yang pernah menjadi pejabat komunis era Uni Soviet.

Undang-undang tersebut dikeluarkan setelah Ukraina dilanda demonstrasi kelompok oposisi sepanjang tahun 2001-2002. Tokoh oposisi Azimbek Berknarov ditahan pada bulan Januari 2002. Sedangkan pemimpin oposisi lainnya, Feliks Kulov dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan korupsi ketika menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional pada bulan Mei 2002. Terhadap tindakan ini, tokoh HAM Ukraina, Sherali Nazarkulov, melakukan aksi mogok makan.

Di tengah gencarnya aksi demo dan ledakan bom di beberapa kota, pemerintah semakin represif. Kaum oposisi semakin memperkuat tekanan mereka kepada Presiden Akayev yang dicurigai mendukung KKN untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Apalagi setelah Kepala Komisi Anti Korupsi, Kolonel Chynybek Aliyev, ditemukan tewas tertembak pada bulan Mei 2004.

Puncak pemicu kerusuhan adalah pada pemilu parlemen 27 Februari 2005. Hasil pemilu parlemen putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2005, semakin memperkuat tekanan kelompok oposisi. Pemerintah Federasi Rusia yang mendukung Presiden Askar Akayev menuding negara-negara asing tertentu seperti Amerika Serikat berada di balik gerakan oposisi. Pengalaman di Ukraina menjadi acuan Rusia. Tuduhan yang mungkin agak bias, sebab selama ini Askar Akayev sangat kooperatif terhadap AS. Ketika menyerang Afganistan tahun 2002, Akayev mengizinkan AS membuka pangkalan militer di wilayahnya. Izin yang sama diberikan pula kepada Rusia yang membuka pangkalan militer di Ukraina

Amerika yang diyakini sebagai aktor dibalik terjadinya revolusi di Kirgizstan sebagaimana yang dilaporkan media-media massa barat, terlibat dalam berbagai upaya politik, budaya, ekonomi serta peran pusat-pusat pendidikan AS dalam memberikan pengarahannya bagaimana cara menggalang sebuah revolusi dan memprovokasi masyarakat Kirgiztan agar menginginkan perubahan, serta berbagai usaha untuk mengadu domba antara kelompok elit di utara dengan warga Kirgizstan di selatan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi

Kaum pemodal Amerika yang kaya, berikut perusahaan mereka, mendukung kelompok-kelompok yang diklaim demokratik ini. Dana yang dipersiapkan untuk program demokratisasi di Kirgiztan pada tahun 2004 diperkirakan sekitar US\$ 12 juta.⁴

Disamping itu Amerika juga mengeluarkan jutaan dolarnya melalui organisasi non-pemerintah (NGO), seperti *House of Liberalization* untuk memobilisasi agen-agen, dan merusak organisasi sipil, mendukung kebebasan pers, mendorong oposisi, mendorong kemarahan umum melawan sistem.

House of Liberalization telah didukung perusahaan Ford, Soros, Unilever, Perwakilan Amerika untuk pembangunan dunia dan kementerian luar negeri Amerika, dan juga perusahaan Wiralpoll yang juga dikenal sebagai direktur yang ekstrim dan pernah menjadi direktur CIA. Niat mereka yang sesungguhnya bukanlah membebaskan bangsa-bangsa tersebut dari tiran yang mengikuti rezim militer Rusia, tetapi membebaskan ekonomi dan meletakkannya dibawah

⁴ "Politik AS terhadap Russia dan Negara-negara bekas Uni Soviet"

www.korintiallam.net/essays/essays?id=546_0_1_0_C_27k (diakses 21 Juni 2006)

cengkaman Amerika, agar perusahaan Amerika berkesempatan untuk mengeruk kekayaan negara-negara tersebut.

Gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh AS terhadap kepemimpinan Presiden Askar Akayev berhasil menjatuhkannya dari kursi kepresidenan dengan isu kecurangan pemilu, dan berhasil mendalangi Revolusi Tulip di Kirgiztan. Askar Akayev pun melarikan diri ke Moskow pada akhir Maret 2005. setelah itu, kelompok oposisi menguasai kota dan membentuk pemerintahan ad interim.⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka disusun suatu rumusan permasalahan sebagai berikut, “Faktor-faktor apa yang menyebabkan AS terlibat dalam penggulingan Presiden Askar Akayev?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan Amerika Serikat dalam penggulingan Presiden Askar Akayev
2. Untuk menambah wawasan mengenai situasi politik, terutama yang terjadi di negara-negara yang sebelumnya berideologi komunis, seperti yang terjadi di negara-negara pecahan Uni Soviet.

⁵Muhammad Ismail Yusanto, “*Pernyataan Pers: Hizbut Tahrir Menantang Karimov Mengakhiri Tiranisme Kibinikhanov*”, [http://www.hizbut-tahrir.org.id](mailto:ismailyusanto@hizbut-tahrir.org.id) (diakses 28 juni 2006)

3. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu menjawab rumusan permasalahan diatas, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri (Plano dan Olton, 1982), dan ditujukan untuk:

- a) self preservation
- b) security
- c) national well-being
- d) protection and advancement of technology
- e) the pursuit of power

Sedangkan Hans J. Morgenthau dalam bukunya **Politics among Nations** menyebutkan bahwa kepentingan nasional adalah kepentingan setiap negara untuk mengejar kekuasaan atau power yang diwujudkan dalam elemen-elemen geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiapsiagaan militer, jumlah penduduk, kualitas regional, kualitas diplomasi dan secara keseluruhan membentuk apa yang

disebut sebagai “*the degree of determination with which a nation supports the foreign policies of its government in peace or war*”.

1. Teori Demokrasi

Samuel P. Huntington menyebutkan bahawa terjadinya proses transisi demokrasi dari rezim-rezim non demokratis dapat melalui 4 proses, yaitu:

- a) *Transformasi* atau *Reforma*, dimana elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokratisasi.
- b) *Replacement* atau *Ruptura*, dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi.
- c) *Transplacement* atau *Ruptforma*, dimana demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan bargaining antar pemerintah dengan kelompok oposisi.
- d) *Intervensi*, yang jarang terjadi yaitu dimana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor luar.⁶

Berdasarkan teori diatas, upaya demokratisasi yang dicoba dilakukan di Kirgizstan menggunakan model *Replacement* atau *Ruptura*, yakni transisi demokrasi yang di pelopori oleh kelompok oposisi. Dalam proses *Replacement*, kelompok pembaharu masih sangat lemah atau tidak ada dalam rezim itu. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim, kelompok ini biasanya sangat kuat dan solid. Di kirgizstan Kelompok konservatif tersebut tidak lain adalah Presiden

⁶ Samuel P. Huntington, “*Selektora Demokratisasi Ketiga*” Jakarta, Grafiti Press, 2000.

Askar Akayev yang selalu mendapat dukungan Parlemen. Hal ini dapat terlihat dari hasil referendum tahun 1996 yang memberikan wewenang lebih besar kepada Presiden daripada Parlemen.

Demokratisasi baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah atau kelompok konservatif semakin lemah sehingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Proses ini meliputi tiga fase yang berbeda, yakni: perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan setelah tumbangnya rezim.

Sementara itu, kelompok oposisi yang dimaksud sebagai pelopor demokratisasi di Kirgizstan adalah rakyat yang ingin melakukan perubahan dalam sistem politik Kirgizstan, termasuk mengganti pemerintahan dengan yang lebih demokratis.

Fase *Replacement* yang terjadi di Kirgizstan sudah sampai pada fase tumbangnya rezim serta fase menuju perjuangan paska tumbangnya rezim. Pada transisi demokrasi dengan model *Replacement* mensyaratkan kelompok oposisi harus kuat agar dapat mengikis kekuasaan pemerintah dan menggeser perimbangan kekuatan ke arah yang menguntungkannya sehingga rezim otoriter dapat digulingkan dan demokratisasi bisa terwujud dan hal ini bisa berhasil di Kirgizstan .

Fase *Replacement* pada umumnya terjadi di negara-negara otoriter dengan sistem diktator perorangan. "Ciri khas kediktatoran perorangan diantaranya sang pemimpin merupakan sumber wewenang, dan kekuasaan bergantung pada akses

dukungan darinya.”⁷ Selain itu, ciri khas lain dari sistem diktator perorangan adalah menindas persaingan dan aspirasi.

Kirgizstan merupakan salah satu rezim otoriter yang menganut sistem diktator perorangan. Askar Akayev sebagai Presiden Kirgizstan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar yang pada akhirnya mengantarkan pada sikap kurang bersahabatnya dengan media massa. Padahal, Kirgistan yang merdeka tahun 1991 merupakan satu-satunya negara di Asia Tengah yang dipimpin oleh seorang tokoh liberal-Akayev-dan bukannya mantan pemimpin partai komunis di zaman Uni Soviet. Semula kemunculan Akayev memberikan harapan baru. Ia memperkenalkan demokrasi multipartai, memulai swastanisasi, dan reformasi ekonomi terencana yang didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Akan tetapi, belakangan start yang baik itu tidak berjalan baik. Presiden makin menumpuk kekuasaan, korupsi, dan nepotisme merajalela, dan partai-partai oposisi dimarjinalkan.⁸

Samuel P. Huntington menyebutkan adanya beberapa faktor yang menghambat demokrasi terwujud di beberapa negara. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori besar.

Yang pertama adalah politik, yakni tidak adanya pengalaman dengan demokrasi pada kebanyakan negara yang masih otoriter di tahun 1990-an dan para pemimpin yang menciptakan rezim otoriter atau yang tetap berkuasa untuk waktu

⁷ *ibid*, hal. 143

⁸

lama dalam rezim-rezim semacam itu, biasanya menjadi kaum konservatif yang gigih menentang demokratisasi. Kedua adalah faktor budaya, tradisi-tradisi budaya yang sangat bervariasi dan tidak demokratis tentunya akan menghambat penyebaran-penyebaran demokrasi di dalam masyarakat. Ketiga adalah faktor ekonomi, kemiskinan merupakan suatu penghalang utama demokrasi di suatu negara karena demokrasi sangat tergantung pada perkembangan ekonomi di suatu negara.⁹

Dari ketiga faktor penghambat demokrasi yang dipaparkan Huntington diatas, walaupun tidak terlalu signifikan namun semua faktor tersebut ada dan ikut andil terjadinya revolusi di Kirgizstan. Namun, tanpa mengabaikan faktor-faktor yang lain, dalam karya tulis ini penulis hanya memfokuskan pada faktor politik, karena faktor politik merupakan faktor utama dan paling dominan yang mengakibatkan terjadinya revolusi di Kirgizstan.

Pada tahun 1990 Kirgizstan masih berada di bawah bendera Uni Soviet. Walaupun pada tahun tersebut Gorbachev sedang mendengungkan konsep pembaharuannya, termasuk konsep demokratisasi, namun pada saat itu, Kirgizstan telah berada di bawah pimpinan Presiden Askar Akayev yang awalnya sangat demokratis tapi kemudian terus berupaya melanggengkan kekuasaannya.

Berada di bawah rezim otoriter Uni Soviet selama 70 tahun, telah mengakibatkan otoriterisme tersebut menjadi suatu sistem yang turun temurun dan membudaya di kalangan para elit, walaupun negara tersebut telah terpisah dan

⁹ Samuel P. Huntington *Op. cit.* hal. 147

menjailah negara yang merdeka. Pemerintahan yang otoriter akan selalu menjadi penghambat bagi terlaksananya demokratisasi. Karena dengan adanya demokratisasi berarti akan mengurangi kekuasaan dan kontrol pemerintah terhadap rakyat, sehingga para penguasa tersebut akan berupaya mati-matian mempertahankan kekuasaan mereka dan menghambat terjadinya demokratisasi.

Menurut Huntington, lingkungan internasional dan aktor-aktor luar negeri telah memainkan peran penting dalam penciptaan demokrasi. Yang dimaksud dengan "lingkungan eksternal" disini adalah pemerintah asing dan aktor-aktor lain yang juga demokratis, mendukung eksistensi rezim demokratis di negara lain, dan memiliki hubungan dekat dengan negara demokratis.¹⁰

Apalagi ketika pengaruh tersebut terhadap negara-negara dunia ketiga, karena kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan yang terjadi di negara mereka (negara dunia ketiga) membuat negara tersebut mencari nilai-nilai yang lebih baik yang akan membuat atau menciptakan kondisi yang akan memberikan kesejahteraan atau kemakmuran untuk diri mereka sendiri

Keberadaan dan kedekatan Amerika Serikat dengan Kirgizstan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mensukseskan revolusi yang terjadi di negara tersebut. Sebagai sebuah negara demokratis terbesar, seharusnya Amerika Serikat dapat memberikan pengaruhnya untuk mendorong demokratisasi di negara tersebut. Pinjaman utang luar negeri untuk Kirgizstan seharusnya bisa dijadikan alat untuk memajukan pemerintah agar melakukan demokratisasi

Namun, tentu saja hal ini akan menjadi berbalik ketika AS memiliki kepentingan lain terhadap rezim otoriter tersebut. Karena seperti kita ketahui, AS seringkali menggunakan politik standar ganda untuk mendapatkan dan melindungi kepentingannya. Salah satu kepentingan Amerika Serikat di Kirgizstan adalah untuk mempermudah melakukan operasi di Afghanistan dalam mencari sisa-sisa pemerintahan Taliban.

Untuk mempermudah operasinya, Kirgizstan memberikan bantuan militer dan fasilitas pangkalan udara bagi Amerika Serikat di dekat ibu kota Bishkek. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat memberikan bantuan pinjaman luar negeri bagi Kirgizstan dalam jumlah besar. Jadi, di satu sisi Amerika Serikat mengkampanyekan demokrasi bagi negara-negara yang masih otoriter, tapi di sisi yang lain Amerika Serikat malah mendukung rezim-rezim otoriter yang memberikan bantuan dan dukungan terhadap kepentingannya.

F. Hipotesa

Faktor-faktor keterlibatan Amerika dalam Revolusi Tulip yang terjadi di Kirgizstan disebabkan adanya faktor Politik yakni, “Adanya undang-undang yang mendukung demokratisasi, yang menjadi pijakan utama politik luar negeri Amerika terhadap Rusia untuk mengukuhkan pengaruhnya di Asia Tengah yang dikeluarkan oleh Kongres Amerika pada tanggal 3 Januari 1992.” dan adanya faktor ekonomi yaitu, keinginan AS untuk menguasai sumber cadangan Minyak serta gas alam yang cukup menunjang kekurangan energi dalam negeri AS

apa yang diperkenalkan sebagai UU Pendukung Liberalisasi. Ketiga adalah faktor pertahanan keamanan, bagi Amerika Kirgizstan bisa dijadikan sebagai basis baru dan batu loncatan untuk menyerang Taliban yang mana Osama bin Laden berada.

G. Metodologi Penulisan Dan Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam hal ini mengenai keterlibatan Amerika dalam penggulingan Presiden Askar Akayev.

Data-data yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan masalah. Data diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal-jurnal di internet dan CD-Room, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

H. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas dan penyelesaiannya lebih konkrit, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Batasan waktu yang digunakan penulis adalah sejak Askar Akayev menjadi presiden di Kirgizstan hingga terjadinya Revolusi Tulip yang menggulingkan beliau dari kekuasaan

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, maka secara keseluruhan penulis membagi karya tulis ini kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penulisan dan pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Sejarah Politik Kirgiztan

Pada bab ini akan dibicarakan mengenai sejarah Rusia pada saat melakukan invasi ke Kirgizstan hingga pada masa Kirgizstan berada dibawah periode Uni Soviet. Dampak pemikiran Mikhail Gorbachev sampai pengaruhnya bagi Kirgizstan. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas Kirgizstan paska keruntuhan Uni Soviet dibawah kepemimpinan Askar Akayev.

BAB III. Revolusi Tulip dan Penggulingan terhadap Presiden Askar Akayev

Dalam bab ini akan dibahas masa kepemimpinan Askar Akayev, perjalanan politiknya hingga kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Gerakan revolusi di negara-negara eks Uni Soviet dan Revolusi Tulip serta peran posisi didalamnya,

sampai keadaan negara dan parlemen negara tumbangnya Askar Akayev

BAB IV. Kepentingan AS di Kirgizstan

Di bab IV ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan AS mempunyai kepentingan di Kirgizstan yaitu Faktor Politik, Faktor Ekonomi, Faktor Pertahanan Keamanan.

BAB V. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab akhir yang akan menutup karya tulis ini, yang berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.